



# **RENCANA STRATEGIS**

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG  
TAHUN 2018-2023**

**PADANG PANJANG  
2019**

## **DAFTAR ISI**

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	7
	1.4 Sistematika Penulisan	8
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>9</b>
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
	2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah	15
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	33
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>37</b>
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	37
	3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	38
	3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga	42
	3.4 Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	43
	3.5 Analisis Isu-Isu Strategis	46
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DAERAH</b>	<b>51</b>
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	51
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>51</b>
	5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	51
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>56</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>74</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>75</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023	14
Gambar 3.1	Hubungan Antar Pokok Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	40

## **DAFTAR DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai menurut Latar Belakang Pendidikan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Keadaan Januari 2019	15
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Keadaan Januari 2019 (Tidak Termasuk Tenaga Harian Lepas)	15
Tabel 2.3	Moubiler pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Keadaan Januari 2019	16
Tabel 2.4	Peralatan Kantor pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Keadaan Januari 2019	16
Tabel 2.5	Perlengkapan Kantor pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Keadaan Januari 2019	17
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2014-2018	19
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023	52
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	54
Tabel 6.1	Keterkaitan Antara Kelompok Sasaran, Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang 2018-2023	56
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023	67

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa setiap OPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap OPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra OPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra OPD terdiri dari tahapan sebagai berikut : (1) persiapan penyusunan Renstra OPD; (2) penyusunan rancangan Renstra OPD; (3) penyusunan rancangan akhir Renstra OPD; dan (4) penetapan Renstra OPD.

Sebagai Kota yang berjuluk Serambi Mekah, pembangunan Kota Padang Panjang selama (5) lima tahun kedepan diarahkan untuk mewujudkan visi Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 yaitu **“UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT”**. Pernyataan visi tersebut merupakan komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam konteks lain, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap OPD harus memiliki Rencana Strategis (Renstra). Renstra OPD yang berpedoman pada RPJMD, dan disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Renstra OPD adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, yaitu periode 5 (lima) tahun OPD. Renstra OPD merupakan pedoman bagi OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi OPD yang menjadi kewenangannya, melalui program kerja yang dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan yang tepat. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa OPD menyusun Renstra OPD yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang dirumuskan dengan berpedoman pada RPJMD.

Dalam kaitan ini, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang merupakan perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang juga berkewajiban untuk menyusun Renstra untuk 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan penelitian dan pengembangan, tentu saja Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah diharapkan mampu menggambarkan bagaimana proses, implementasi dan evaluasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini mengandung makna bahwa Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan dukungan SDM yang ada, harus mampu menjembatani OPD yang ada, terutama dalam hal perencanaan pembangunan, dan penelitian dan pengembangan.

Selanjutnya, Renstra OPD juga memiliki peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Walikota terpilih. Renstra OPD dirumuskan melalui proses yang sama dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD, dimana RPJMD tersebut dirumuskan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *top down* dan *bottom up*. Renstra OPD disusun melalui tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renstra OPD
2. Penyusunan rancangan Renstra OPD
  - a. Perumusan rancangan Renstra OPD, dengan tahapan sebagai berikut :

- ) Pengolahan data dan informasi
  - ) Analisis gambaran pelayanan OPD
  - ) Review Renstra kementerian/lembaga dan Renstra OPD provinsi
  - ) Penelaahan RTRW Kota
  - ) Analisis terhadap dokumen KLHS
  - ) Perumusan isu-isu strategis
  - ) Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah OPD
  - ) Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah OPD
  - ) Mempelajari surat edaran Walikota perihal penyusunan rancangan Renstra OPD
  - ) Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah OPD
  - ) Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun
  - ) Perumusan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
  - ) Pelaksanaan forum OPD
- b. Penyajian rancangan Renstra OPD
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra OPD
4. Penetapan Renstra OPD

Renstra OPD merupakan penjabaran RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dimaksud. Perumusan Renstra OPD, termasuk Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang dilakukan dengan menganalisis RTRW Kota, hasil-hasil kajian terkait, serta mempertimbangkan Renstra Kementerian/Lembaga terkait dan Renstra OPD Provinsi. Disamping itu, Renstra OPD akan dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan tahunan OPD, yaitu Rencana Kerja (Renja) OPD tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Secara umum, landasan hukum yang mendasari penyusunan Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
15. Instruksi Presiden 9 Tahun 2010 Tentang Pengarus Utamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standart Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27)
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6 );
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13 );
25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
26. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang

- Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 16 Seri D.3);
27. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
28. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dirumuskan dengan maksud menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Walikota terpilih yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai masa periode kepemimpinan Walikota.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai penjabaran visi dan misi Walikota terpilih.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- c. Menerjemahkan visi dan misi Walikota kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023.

- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023.

#### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Menjabarkan tugas, fungsi dan struktur organisasi OPD, sumber daya OPD, kinerja pelayanan OPD tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaahan vsi, misi dan program Walikota terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi, telaahan RTRW dan KLH, penentuan isu-isu strategis.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran dan Indikator serta Target Kinerja dalam rancangan awal RPJMD

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja perangkat daerah.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat rencana program dan kegiatan serta pendanaannya

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang adalah salah satu Lembaga Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan penunjang bidang perencanaan pembangunan, dan bidang penelitian dan pengembangan;
2. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah;
3. Pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
4. Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
5. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan; dan
6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi, berpedoman pada Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang. Berikut ini adalah susunan Organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang yaitu terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Perencanaan Makro, Evaluasi dan Informasi Pembangunan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan;
  - b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dan
  - c. Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan.
4. Bidang Pembangunan Manusia , Sosial Budaya, dan Pemerintahan terdiri dari
  - a. Sub Bidang Pembangunan Manusia;
  - b. Sub Bidang Sosial Budaya; dan
  - c. Sub Bidang Pemerintahan.
5. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Ekonomi;
  - b. Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
  - c. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Teknologi dan Inovasi ;
  - b. Sub Bidang Pengkajian Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan; dan
  - c. Sub Bidang Pengkajian Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.
7. Unit Pelaksana Teknis.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut:

#### **1. Kepala Badan**

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis urusan penunjang bidang Perencanaan, dan bidang Penelitian dan Pengembangan;

- b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan daerah;
- c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- d. pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tatalaksana serta kehumasan; dan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan leh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

## **3. Bidang Perencanaan Makro, Evaluasi dan Informasi Pembangunan**

Bidang Perencanaan Makro, Evaluasi dan Informasi Pembangunan dikepalai oleh Kepala Bidang Perencanaan Makro, Evaluasi dan Informasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA dalam hal mengkoordinasikan dan menyusun perencanaan pembangunan daerah, melakukan pemantauan dan menyusun evaluasi laporan pelaksanaan pembangunan, dan melakukan penyusunan, analisa dan penilaian data dan informasi pembangunan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan Makro, Evaluasi dan Informasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyusunan perencanaan pembangunan;
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program data dan informasi pembangunan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4. Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan**

Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan dikepalai oleh Kepala Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA dalam hal mengkoordinasikan dan merencanakan pembangunan di bidang pembangunan manusia, sosial budaya dan pemerintahan yang terdiri dari urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kepegawaian, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembangunan manusia;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sosial budaya;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pemerintahan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **5. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur**

Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur dikepalai oleh Kepala Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam hal mengkoordinasikan dan merencanakan pembangunan di bidang urusan pariwisata, penanaman modal, tenaga kerja, perdagangan, koperasi, perindustrian, keuangan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, pertanahan, kecamatan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanian, pangan, dan kelautan dan perikanan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program ekonomi;
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

#### **6. Bidang Penelitian dan Pengembangan**

Bidang Penelitian dan Pengembangan dikepalai oleh kepala oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA dalam hal mengkoordinasikan, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan untuk menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, pembangunan manusia, sosial budaya, pemerintahan, ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

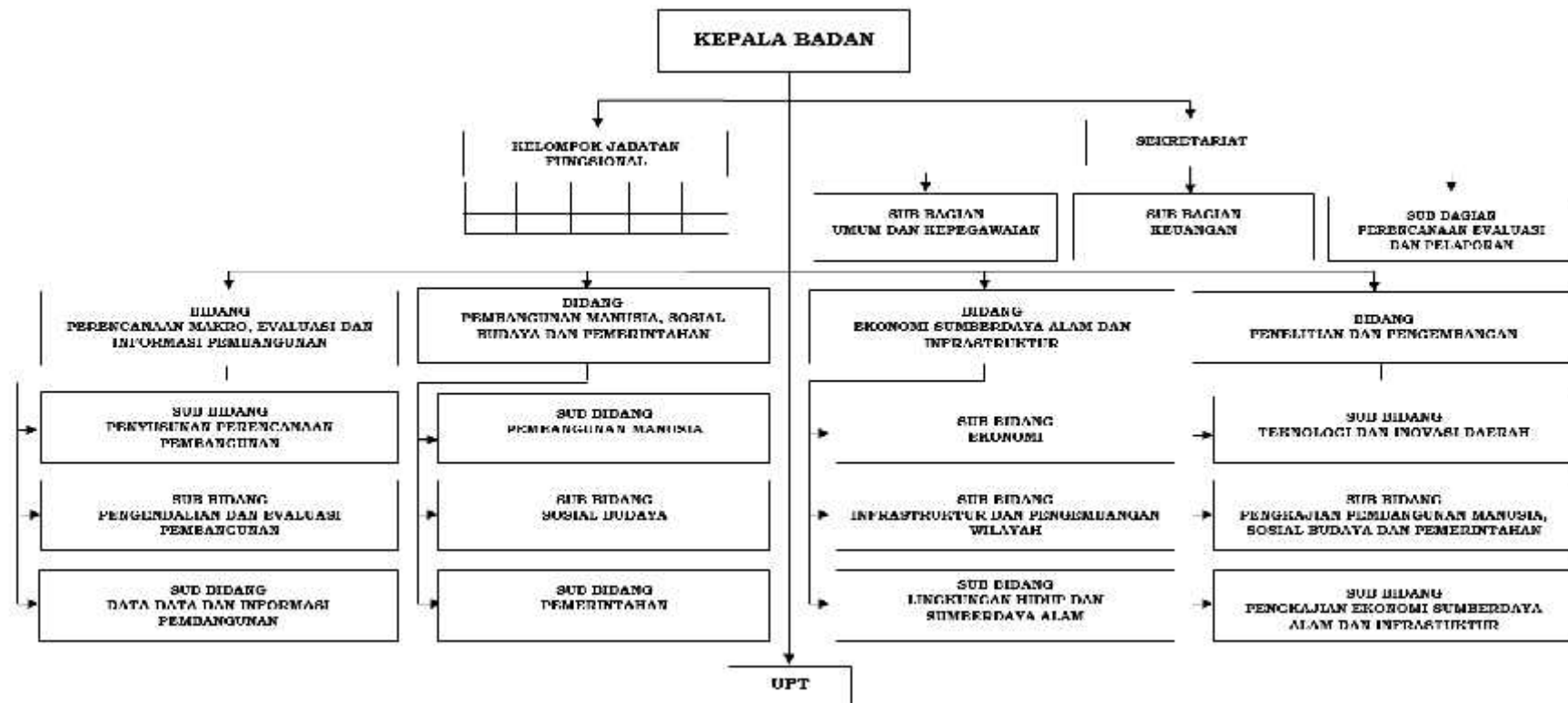
- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program teknologi dan inovasi daerah;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengkajian pembangunan manusia, sosial budaya dan pemerintahan;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengkajian ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



Adapun struktur organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagaimana gambar pada Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG



## 2.2 SUMBERDAYA PERANGKAT DAERAH

### 1. Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang didukung oleh sumber daya manusia yaitu seperti tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai menurut Latar Belakang Pendidikan**  
**Keadaan Januari 2019**

NO	Golongan	SD	SLTP	SLTA	D.I	D.III	D.IV	SI	S2	S3	Jumlah
1	IV	-	-	-	-	-	-	5	7	1	13
2	III	-	-	1	-	3	-	9	3		16
3	II	-	-	4	-	-	-	-	-		4
4	I	-	1	-	-	-	-	-	-		1
5	THL/PTT	-	-	6	-	1	-	-	-		7
Jumlah		-	1	11	-	4	-	14	10	1	41

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional**  
**Keadaan Januari 2019 (Tidak Termasuk Tenaga Harian Lepas)**

No	Jabatan Struktural / Fungsional	Jumlah
1	Eselon II.b	1
2	Eselon III.a	1
3	Eselon III.b	4
4	Eselon IV.a	15
5	Eselon IV.b	-
6	Fungsional	-
7	Staf	14
Jumlah		41

### 2. Perlengkapan/ Asset

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dilengkapi dengan aset yang terdiri atas peralatan dan perlengkapan. Adapun aset yang dimiliki Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Meubilleur Keadaan Januari 2019**

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi (Unit)		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Lemari Kayu	8	Buah	8	-	
2	Lemari Besi	11	Buah	9		2
3	Filling Besi / Metal	8	Buah	3		5
4	Meja Rapat	22	Buah	22		
5	Meja Tulis	5	Buah	5		
6	Podium	1	Buah	1		
7	Kursi Rapat	80	Buah	80		
8	Kursi Tamu	2	Set	2		
9	Kursi Putar	16	Buah	9		7
10	Kursi Biasa	24	Buah	24		
11	Kursi Lipat	19	Buah	8		11
12	Meja Komputer	0	Buah	0		
13	Rak Kayu	2	Buah	2		
14	Lemari Kaca	2	Buah	2		
15	Lemari Makan	12	Buah	12		
16	Meja Biro	18	Buah	18		
17	Meja 1/2 Biro	1	Buah	1		

**Tabel 2.4**  
**Peralatan Kantor Keadaan Januari 2019**

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi (Unit)		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
	<b>Peralatan Kantor</b>					
1	PC Unit	21	Buah	15		6
2	Laptop	33	Buah	25		8
3	Note Book	2	Buah	1		1
4	Monitor	1	Buah	1		
5	Printer	26	Buah	16		10
6	Plotter	1	Buah			1
7	External Hardisk	8	Buah	2		6
8	Scanner	5	Buah	5		
	<b>Kendaraan Dinas Operasional</b>					
1	Mobil Dinas	3	Buah	2	1	
2	Sepeda Motor	21	Buah	20		1

**Tabel 2.5**  
**Perlengkapan Kantor Keadaan Januari 2019**

NO	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi (%)		
				Baik	Kurang baik	Rusak
1	Televisi	5	Buah	3		2
2	GPS SIPKD	1	Buah	1		
3	Mesin Absensi	2	Buah	1		1
4	Unit Power Supply	3	Buah	3		
5	Camera Video	3	Buah	3		
6	Handycame	2	Buah	2		1
7	Proyektor + Attachment	10	Buah	4	2	4
8	Sound System	1	Buah	1		
9	Unintemuptible Power Supply	8	Buah	2		6
10	Handy Talky	2	Buah	2		
11	Facsimilie	4	Buah	1		3
12	Generator Set	2	Buah	2		
13	Mesin Penghisap Debu	1	Buah	1		
14	Papan Visual	1	Buah	1		
15	Papan Nama Instansi	2	Buah	1		1
16	Elektrik White Board	1	Buah	1		
17	Alat rumah Tangga lainnya	10	Buah	10		
18	Alat Pemadam Portable	5	Buah	5		
19	Tabung Gas	1	Buah	1		
20	Dispenser	1	Buah	1		
21	Band Kas	1	Buah	1		
22	Kompor Gas	2	Buah	1		1
23	Tangga Alumunium	1	Buah	1		
24	Papan Pengumuman	1	Buah	1		
25	White Board	1	Buah	1		
26	Mesin Tik Elektrik	1	Buah	1		
27	Mesin Penghancur Kertas	3	Buah	2		1

### 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan tingkat capaian pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang pada periode Renstra sebelumnya (2014-2018). Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang dengan kinerja yang dibutuhkan. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Badan Perencanaan, Peneleitian dan Pengembangan pada periode sebelumnya, sedangkan realisasinya adalah hasil dari pelaksanaan kinerja Badan Perencanaan Pneleitian dan Pngembangan Daerah selama periode 2014-2018. Dalam semua sasaran

dan program yang direncanakan, tingkat capaian kinerja menunjukkan kesesuaian kinerja menunjukkan kesesuaian yang sempurna yaitu 100%.

Sebelumnya dapat disampaikan Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang pada periode Renstra sebelumnya (2014-2018) melakukan 2 (dua) kali revisi yaitu di tahun 2017 dimana pada saat tersebut ada perubahan nama, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kemudian revisi kedua pada tahun 2018 berkaitan dengan penyempurnaan Renstra setelah melakukan koordinasi dan konsultasi perbaikan dokumen Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bersama OPD dilingkungan Pemerintahan Kota Padang Panjang dan disarankan untuk melakukan revisi untuk penyempurnaan Renstra sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Jadi untuk melihat pencapaian kinerja perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 2.6, tabel 2.7 dan tabel 2.8. sedangkan untuk anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah pada tabel 2.9 dibawah ini :

**Tabel 2.6**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2014-2018**

no	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -					Ket.
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	6	6	6	6	7	6	6	6			100	100	100			
2	Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang	%	90	95	100	100	100	90	95	100			100	100	100			
3	Persentase usulan musrenbang kecamatan terakomodir dalam RKPD	%	60	65	70	75	80	60	65	70			100	100	100			
	Persentase konsistensi RKPD dgn KUA PPA	%	80	82,5	85	87,5	90	80	82,5	85			100	100	100			
	Persentase konsistensi KUA PPA dgn APBD	%	90	92,5	95	97,5	100	90	92,5	95			100	100	100			
4	Jumlah rapat koordinasi perencanaan pembangunan daerah	kali	10	10	10	11	10	10	10	10			100	100	100			
5	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	laporan/ kali	6	4	4	4	4	6	4	4			100	100	100			
6	Jumlah dokumen/ jenis data yang diterbitkan	Dokumen/ buku	5	5	5	4	4	5	5	5			100	100	100			
7	Jumlah kajian/ penelitian	Judul		1	1	1	1		1	1			100	100	100			
	Jumlah diskusi aktual yang dilaksanakan	Judul		2	2	2	2		2	2			100	100	100			
8	Kenaikan nilai investasi	Milyar rupiah	515	546	578	609	640	515	546	578			100	100	100			

**Tabel 2.7**

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG 2013-2018 (TAHUN PELAKSANAAN 2017-2018)**

no	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke -		Realisasi Capai- an Tahun ke -		Rasio Capaian pada Tahun ke -		Ket.
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah dokumen perencanaan yang ditindak lanjuti	Dokumen	6	7	6		100		
2	Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang	%	100	100	97,82		97,82		
3	Persentase usulan musrenbang kecamatan terakomodir dalam RKPD	%	75	80	87,5		116,6		
4	Jumlah rapat koordinasi perencanaan pembangunan daerah	kali	11	11	11		109,3		
5	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	laporan/ kali	4	4	4		100		
6	Persentase pemanfaatan hasil keliitbangan dalam perumusan kebijakan daerah	%	0	57	0		100		
7	Tingkat integrasi data OPD dalam Padang Panjang satu Data	%	75	80	75		100		

**Tabel 2.8**

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG 2018 (TAHUN PELAKSANAAN 2018)**

no	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke -	Realisasi Capai-an Tahun ke -	Rasio Capaian pada Tahun ke -	Ket.
			2018	2018	2018	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase konsistensi dokumen RPJMD ke dalam RKPD	%	75	75	100	
2	Persentase konsistensi dokumen RKPD ke dalam APBD	%	70	70	100	
3	Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam APBD	%	70	70	100	
4	Presentase hasil penelitian/kajian dalam perumusan kebijakan daerah	%	20	30	150	

**TABEL. 2.9**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2014-2018**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Belanja Langsung	3,699,515,000	4,101,435,900	4,210,327,000	3,609,129,950	4,341,712,886	3,118,705,912	3,180,652,945	3,129,317,109	3,246,295,882	3,816,698,139	84.30 %	77.55 %	74.32 %	89.95 %	87.91 %	3,992,424,147	3,298,333,997
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,335,897,000	1,335,029,400	1,418,458,000	1,463,007,200	1,337,044,386	1,111,711,937	973,985,518	1,069,148,080	1,306,143,320	1,216,797,570	83.22 %	72.96 %	75.37 %	89.28 %	91.01 %	1,377,887,197	1,135,557,285
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3,800,000	3,800,000	4,800,000	4,550,000	4,650,000	3,404,000	3,318,000	4,425,000	4,450,000	4,350,000	89.58 %	87.32 %	92.19 %	97.80 %	93.55 %	4,320,000	3,989,400
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	105,600,000	123,400,000	81,000,000	43,215,000	36,400,000	90,239,728	68,170,555	32,775,460	35,343,722	27,998,455	85.45 %	55.24 %	40.46 %	81.79 %	76.92 %	77,923,000	50,905,584
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	294,702,000	351,281,000	334,903,000	221,050,000	209,350,000	230,008,600	200,210,800	183,080,805	180,973,323	179,920,480	78.05 %	56.99 %	54.67 %	81.87 %	85.94 %	282,257,200	194,838,802
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	95,500,000	104,800,000	73,200,000	65,700,000	0	85,350,000	71,920,000	65,700,000	65,700,000	0	89.37 %	68.63 %	89.75 %	100.0 0%	0.00 %	84,800,000	72,167,500
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	86,460,000	114,575,000	119,831,300	156,212,700	147,900,000	59,267,200	75,965,300	109,951,218	145,470,348	144,032,264	68.55 %	66.30 %	91.76 %	93.12 %	97.38 %	124,995,800	106,937,266
6	Penyediaan alat tulis kantor	92,986,000	88,869,400	90,165,200	99,539,000	55,284,386	89,154,100	84,111,000	85,666,300	98,795,800	55,284,000	95.88 %	94.65 %	95.01 %	99.25 %	100.0 0%	85,368,797	82,602,240
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54,140,000	64,535,000	90,140,000	79,760,000	88,260,000	47,136,000	58,720,400	63,592,100	77,751,500	80,706,050	87.06 %	90.99 %	70.55 %	97.48 %	91.44 %	75,367,000	65,581,210



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,109,000	11,109,000	17,124,500	13,970,500	39,000,000	4,620,000	3,574,500	4,743,150	4,215,500	37,437,400	41.59 %	32.18 %	27.70 %	30.17 %	95.99 %	18,462,600	10,918,110
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,600,000	0	0	0	0	1,594,800	0	0	0	0	99.68 %					1,600,000	1,594,800
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	100,000,000	100,000,000	76,560,000	59,010,000	16,200,000	48,096,400	51,232,050	53,310,400	37,992,350	16,173,800	48.10 %	51.23 %	69.63 %	64.38 %	99.84 %	70,354,000	41,361,000
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	490,000,000	360,000,000	530,734,000	720,000,000	740,000,000	452,841,109	356,762,913	465,903,647	655,450,777	670,895,121	92.42 %	99.10 %	87.78 %	91.03 %	90.66 %	568,146,800	520,370,713
12	Premi Tenaga Kerja Dan Kesehatan Masyarakat	0	12,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %				12,660,000	0
13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	494,455,000	387,650,000	869,300,000	304,065,000	716,800,000	423,099,400	344,519,500	725,320,254	244,520,360	651,346,500	85.57 %	88.87 %	83.44 %	80.42 %	90.87 %	554,454,000	477,761,203
	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	253,990,000	0	377,300,000	0	0	233,591,450	0	351,739,200	0	0	91.97 %		93.23 %			315,645,000	292,665,325
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	156,395,000	35,110,000	307,330,000	120,150,000	360,000,000	133,325,950	24,450,000	276,812,054	106,187,960	344,593,800	85.25 %	69.64 %	90.07 %	88.38 %	95.72 %	195,797,000	177,073,953
	Pengadaan Meubeler	0	95,110,000	13,000,000	17,000,000	0	0	93,410,000	0	0	0		98.21 %	0.00 %	0.00 %		41,703,333	31,136,667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	40,000,000	20,000,000	75,000,000	60,000,000	75,000,000	29,557,000	10,203,500	63,148,000	60,000,000	60,223,700	73.89 %	51.02 %	84.20 %	100.00 %	80.30 %	54,000,000	44,626,440
16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	44,070,000	45,420,000	76,670,000	123,915,000	81,800,000	26,625,000	25,996,000	27,321,000	78,332,400	47,674,000	60.42 %	57.23 %	35.63 %	63.21 %	58.28 %	74,375,000	41,189,680
17	Rehab sedang/berat gedung kantor	0	192,010,000	0	0	200,000,000	0	190,460,000	0	0	198,855,000		99.19 %			99.43 %	196,005,000	194,657,500
18	Pembangunan Gedung Kantor	0	0	20,000,000	0	0	0	0	6,300,000	0	0			31.50 %			20,000,000	6,300,000
																	0	0
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	30,400,000	36,000,000	0	0	47,900,000	30,400,000	31,500,000	0	0	46,600,000	100.00 %	87.50 %			97.29 %	22,860,000	21,700,000
19	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	30,400,000	36,000,000	0	0	47,900,000	30,400,000	31,500,000	0	0	46,600,000	100.00 %	87.50 %			97.29 %	38,100,000	36,166,667
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	3,495,000	945,000	0	15,387,500	3,062,500	3,495,000	945,000	0	15,219,200	2,980,400	100.00 %	100.00 %		98.91 %	97.32 %	5,722,500	5,659,900
20	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	140,000	140,000	0	8,752,000	1,350,000	140,000	140,000	0	8,724,200	1,349,400	100.00 %	100.00 %		99.68 %	99.96 %	2,076,400	2,588,400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	140,000	140,000	0	295,000	295,000	140,000	140,000	0	275,000	270,000	100.0 0%	100.0 0%		93.22 %	91.53 %	174,000	206,250
22	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	140,000	140,000	0	295,000	295,000	140,000	140,000	0	275,000	270,000	100.0 0%	100.0 0%		93.22 %	91.53 %	174,000	206,250
23	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3,075,000	525,000	0	6,072,500	1,122,500	3,075,000	525,000	0	5,945,000	1,091,000	100.0 0%	100.0 0%		97.90 %	97.19 %	2,159,000	2,659,000
	Program Perencanaan Tata Ruang	61,815,000	0	0	21,090,250	0	42,766,250	0	0	21,090,250	0	69.18 %					41,452,625	31,928,250
24	Penyusunan RTRW	61,815,000	0	0	21,090,250	0	42,766,250	0	0	21,090,250	0	69.18 %					41,452,625	31,928,250
	Program Percepatan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	0	0	0	0	27,500,000	0	0	0	0	20,167,404					73.34 %	27,500,000	20,167,404
25	Pemantauan P3MK	0	0	0	0	27,500,000	0	0	0	0	20,167,404					73.34 %	27,500,000	20,167,404
	Program Pengembangan data/informasi	242,890,000	150,277,500	259,025,000	389,325,000	228,075,000	184,397,200	99,384,350	143,602,400	333,134,552	199,504,728	75.92 %	66.13 %	55.44 %	85.57 %	87.47 %	253,918,500	192,004,646
26	Pengembangan dan Updating GIS	85,130,000	56,185,000	0	0	0	46,609,350	32,225,000	0	0	0	54.75 %	57.36 %				28,263,000	15,766,870
27	Penyusunan Daerah Dalam Angka	97,825,000	0	0	0	0	92,529,400	0	0	0	0	94.59 %					19,565,000	18,505,880
28	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	32,175,000	67,285,000	155,900,000	212,925,000	34,000,000	20,825,000	50,350,000	143,602,400	203,747,277	30,235,200	64.72 %	74.83 %	92.11 %	95.69 %	88.93 %	100,457,000	89,751,975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
29	Sistem Informasi Manajemen Perencanaan	0	0	103,125,000	176,400,000	194,075,000	0	0	0	129,387,275	169,269,528			0.00 %	73.35 %	87.22 %	94,720,000	59,731,361
30	Diskusi Aktual Pembangunan daerah	27,760,000	26,807,500	0	0	0	24,433,450	16,809,350	0	0	0	88.02 %	62.70 %				10,913,500	8,248,560
31	Program Kerjasama Pembangunan	32,275,000	31,475,000	0	0	0	29,300,000	30,300,000	0	0	0	90.78 %	96.27 %				12,750,000	11,920,000
	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	32,275,000	31,475,000	0	0	0	29,300,000	30,300,000	0	0	0	90.78 %	96.27 %				12,750,000	11,920,000
																	0	0
32	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	74,600,000	222,030,000	149,925,000	60,000,000	77,000,000	61,100,000	137,611,800	134,005,000	60,000,000	76,738,420	81.90 %	61.98 %	89.38 %	100.00 %	99.66 %	116,711,000	93,891,044
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0	0	60,000,000	0	0	0	0	51,480,000	0	0						12,000,000	10,296,000
	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	62,000,000	80,000,000	0	60,000,000	77,000,000	48,500,000	31,500,000	0	60,000,000	76,738,420	78.23 %	39.38 %	0.00 %	100.00 %	99.66 %	55,800,000	43,347,684
34	Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	12,600,000	21,600,000	0	0	0	12,600,000	12,786,000	0	0	0	100.00 %	59.19 %				6,840,000	5,077,200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
35	Pelatihan dan Pengembangan SDM Aparatur Perencana	0	120,430,000	89,925,000	0	0	0	93,325,800	82,525,000	0	0		77.49 %		#DIV/0!		42,071,000	35,170,160
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	990,815,000	807,296,500	906,985,000	941,640,000	1,033,936,000	834,717,775	722,371,200	789,316,625	882,187,700	830,193,665	84.25 %	89.48 %	87.03 %	93.69 %	80.29 %	936,134,500	811,757,393
36	Penyusunan Rancangan RPJMD	0	0	0	0	270,800,000	0	0	0	0	210,212,863					77.63 %	54,160,000	42,042,573
37	Penyelenggaraan Musrenbang RPJM	35,723,000	0	0	0	0	35,003,300	0	0	0	0	97.99 %					7,144,600	7,000,660
38	Pelaksanaan Forum SKPD Gabungan	32,945,000	39,975,000	45,075,000	48,659,000	48,325,000	31,176,600	33,710,450	41,428,550	46,904,900	28,190,100	94.63 %	84.33 %	91.91 %	96.40 %	58.33 %	42,995,800	36,282,120
39	Penyusunan Rancangan RKPD	40,750,000	44,712,500	55,850,000	66,100,000	14,750,000	39,150,000	35,825,000	52,150,000	61,021,000	14,481,800	96.07 %	80.12 %	93.38 %	92.32 %	98.18 %	44,432,500	40,525,560
40	Musrenbang RKPD	35,778,000	47,977,500	46,785,000	57,515,000	59,240,000	30,235,000	43,087,750	44,432,900	55,909,950	59,048,300	84.51 %	89.81 %	94.97 %	97.21 %	99.68 %	49,459,100	46,542,780
41	Penyusunan KUA	109,038,000	107,929,000	0	54,205,000	18,500,000	99,276,300	99,614,100	0	40,163,650	12,275,300	91.05 %	92.30 %		74.10 %	66.35 %	57,934,400	50,265,870
42	Penyusunan PPA	102,626,000	102,685,000	0	203,634,000	212,625,000	77,373,950	92,612,950	0	191,912,450	199,247,700	75.39 %	90.19 %		94.24 %	93.71 %	124,314,000	112,229,410
43	Penyusunan KUA-PPAS	0	0	120,700,000	0	0	0	0	98,632,700	0	0			81.72 %			24,140,000	19,726,540
44	Penyusunan KUA-PPA Perubahan	150,325,000	152,790,000	121,300,000	118,368,000	158,825,000	141,091,150	132,034,550	107,961,300	105,451,800	109,934,460	93.86 %	86.42 %	89.00 %	89.09 %	69.22 %	140,321,600	119,294,652
45	Evaluasi Pelaksanaan RPJM 2008-2013	21,975,000	0	0	0	0	21,867,900	0	0	0	0	99.51 %					4,395,000	4,373,580
46	Evaluasi Pelaksanaan RPJM 2013-2018	0	21,400,000	44,020,000	19,750,000	10,400,000	0	16,162,250	35,384,950	18,916,650	8,874,900		75.52 %	80.38 %	95.78 %	85.34 %	19,114,000	15,867,750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
47	Investigasi Usulan Kegiatan Pembangunan	44,305,000	33,577,500	35,355,000	33,274,000	44,071,000	43,051,500	32,764,000	35,325,475	32,854,000	44,042,900	97.17 %	97.58 %	99.92 %	98.74 %	99.94 %	38,116,500	37,607,575
48	Review RPI2JM Kota Padang Panjang	22,525,000	23,575,000	19,625,000	53,910,000	4,150,000	22,525,000	23,575,000	19,380,000	53,483,000	4,150,000	100.0 0%	100.0 0%	98.75 %	99.21 %	100.0 0%	24,757,000	24,622,600
49	Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah	18,845,000	24,700,000	190,150,000	123,600,000	19,200,000	16,495,000	24,700,000	184,419,850	119,357,800	10,675,100	87.53 %	100.0 0%	96.99 %	96.57 %	55.60 %	75,299,000	71,129,550
50	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Tugas Pembangunan dan TP UB	16,950,000	49,875,000	0	0	0	16,950,000	48,365,000	0	0	0	100.0 0%	96.97 %				13,365,000	13,063,000
51	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	38,080,000	53,990,000	0	0	21,900,000	30,329,650	41,080,250	0	0	16,996,900	79.65 %	76.09 %			77.61 %	22,794,000	17,681,360
52	Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD	27,800,000	0	0	32,325,000	104,550,000	25,834,600	0	0	30,972,700	92,541,542	92.93 %			95.82 %	88.51 %	32,935,000	29,869,768
53	Fasilitas Pembangunan Sektor air Minum dan Kesehatan Lingkungan	0	0	32,900,000	0	0	0	0	31,477,250	0	0			95.68 %			6,580,000	6,295,450
54	Koordinasi Pelaksanaan kegiatan Yang di Danai APBN dan Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	0	0	99,275,000	37,700,000	18,950,000	0	0	89,953,450	36,904,000	10,718,500			90.61 %	97.89 %	56.56 %	31,185,000	27,515,190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
55	Penyusunan Rancangan RKPDP Perubahan	29,800,000	31,125,000	50,450,000	43,700,000	16,250,000	29,415,000	29,550,000	48,770,200	41,935,800	8,525,000	98.71 %	94.94 %	96.67 %	95.96 %	52.46 %	34,265,000	31,639,200
56	Penetapan RPJMD	250,150,000	0	0	0	0	162,542,825	0	0	0	0	64.98 %					50,030,000	32,508,565
57	Optimalisasi Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi	13,200,000	18,185,000	0	48,900,000	11,400,000	12,400,000	16,650,000	0	46,400,000	278,300	93.94 %	91.56 %	#DIV/0!	94.89 %	2.44 %	18,337,000	15,145,660
58	Evaluasi Pelaksanaan RPJPD	0	16,925,000	0	0	0	0	14,765,000	0	0	0		87.24 %				3,385,000	2,953,000
59	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Dan Pemberdayaan Kelurahan (P3MK)	0	37,875,000	0	0	0	0	37,874,900	0	0	0		100.00 %				7,575,000	7,574,980
60	Revisi RPJMD	0	0	45,500,000	0	0	0	0	42,127,250	0	0						9,100,000	8,425,450
61																	0	0
	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia		0	0	0	85,000,000	0	0	0	0	84,173,000					99.03 %	17,000,000	16,834,600
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0	85,000,000	0	0	0	0	84,173,000					99.03 %	17,000,000	16,834,600
62																	0	0
	Program Perencanaan Sosial Budaya	49,375,000	178,467,500	99,388,000	116,336,000	105,635,000	43,183,500	146,485,050	91,208,000	111,277,500	98,303,100	87.46 %	82.08 %	91.77 %	95.65 %	93.06 %	109,840,300	98,091,430
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	12,150,000	0	0	19,025,000	0	10,662,500	0	0	17,186,050	0	87.76 %					6,235,000	5,569,710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
63	Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	37,225,000	0	0	0	0	32,521,000	0	0	0	0	87.36 %					7,445,000	6,504,200
64	Koordinasi Sinkronisasi Bidang Sosial Budaya	0	16,937,500	15,238,000	0	0	0	12,137,500	11,437,000	0	0		71.66 %	75.06 %			6,435,100	4,714,900
65	Koordinasi Perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya upaya penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial	0	55,390,000	44,750,000	42,050,000	60,350,000	0	48,720,000	41,950,000	40,875,000	54,001,950		87.96 %	93.74 %	97.21 %	89.48 %	40,508,000	37,109,390
66	Koordinasi dan Fasilitasi Tim Koordinasi Pelaksanaan PNPM (TKPP)	0	24,850,000	0	14,516,000	8,405,000	0	21,000,000	0	14,516,000	7,643,850		84.51 %		100.00 %	90.94 %	9,554,200	8,631,970
67	Koordinasi Penyusunan RAD SBK	0	40,170,000	0	0	0	0	30,473,500	0	0	0		75.86 %				8,034,000	6,094,700
68	Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan PUG	0	41,120,000	39,400,000	40,745,000	36,880,000	0	34,154,050	37,821,000	38,700,450	36,657,300		83.06 %	95.99 %	94.98 %	99.40 %	31,629,000	29,466,560
69																	0	0
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	0	0	30,450,000	16,050,000	0	0	0	18,100,000	14,603,000	0			59.44 %	90.98 %		9,300,000	6,540,600
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	0	0	30,450,000	16,050,000	0	0	0	18,100,000	14,603,000	0			59.44 %	90.98 %		9,300,000	6,540,600



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	293,588,000	499,305,000	290,150,000	0	0	274,347,600	262,539,527	232,051,538	0	0		52.58 %	79.98 %	#DIV/0!		216,608,600	153,787,733
70	Penyelenggaraan pameran investasi	260,775,000	270,310,000	193,300,000	0	0	244,085,100	219,060,027	143,944,538	0	0						144,877,000	121,417,933
71	Koordinasi perencanaan pengembangan penanaman modal		20,000,000		0	0		16,060,750		0	0						4,000,000	3,212,150
72	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	32,813,000	84,985,000	17,800,000	0	0	30,262,500	27,418,750	15,435,000	0	0						27,119,600	14,623,250
73	Sayembara Pembuatan Desain Branding/Symbol Padang Panjang		124,010,000	79,050,000	0	0		0	72,672,000	0	0		0.00 %				40,612,000	14,534,400
																	0	0
74	Program Perencanaan Tata Ruang	0	52,525,000	76,200,000	54,900,000	0	0	44,400,000	67,600,000	53,800,000	0		84.53 %	88.71 %	98.00 %		36,725,000	33,160,000
	Rapat Koordinasi tentang Tata Ruang	0	52,525,000	76,200,000	54,900,000	0	0	44,400,000	67,600,000	53,800,000	0		84.53 %	88.71 %	98.00 %		36,725,000	33,160,000
																	0	0
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Penyelesaian Lingkungan	36,150,000	308,750,000				29,927,250	295,695,000									68,980,000	65,124,450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75	Fasilitas Pembangunan sektor air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL)	24,850,000	0	0	0	0	24,627,250	0	0	0	0						4,970,000	4,925,450
76	Penyusunan Dokumen SPPIP (Strategi Pembangunan)	11,300,000	0	0	0	0	5,300,000	0	0	0	0						2,260,000	1,060,000
77	Review Rencana indukSistem Pengelolaan Sumber Daya Alam		308,750,000	0	0	0		295,695,000	0	0	0						61,750,000	59,139,000
																	0	0
	Program Pelayanan & rehabilitasi Pelayanan Sosial	53,760,000	0	0	0	0	50,260,000	0	0	0	0						10,752,000	10,052,000
78	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulang an kemiskinan	53,760,000	0	0	0	0	50,260,000	0	0	0	0						10,752,000	10,052,000
																	0	0
	Program Penelitian dan Pengembangan	0	34,750,000	110,446,000	227,329,000	679,760,000	0	34,620,000	91,016,750	204,320,000	589,893,352	#DIV/0!	99.63 %	82.41 %	89.88 %	86.78 %	210,457,000	183,970,020
79	Koordinasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Kota Pdg Panjang	0	34,750,000	110,446,000	0	0	0	34,620,000	91,016,750	0	0		99.63 %	82.41 %			29,039,200	25,127,350
80	Forum Dewan Riset Daerah	0	0	0	62,925,000	0	0	0	0	58,158,750	0				92.43 %		12,585,000	11,631,750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
81	Penelitian dan Kajian Sosial	0	0	0	77,827,000	95,400,000	0	0	0	66,308,400	78,914,899				85.20 %	82.72 %	34,645,400	29,044,660
82	Penelitian dan Kajian Ekonomi Infrastruktur	0	0	0	54,202,000	93,100,000	0	0	0	50,796,400	77,761,600				93.72 %	83.52 %	29,460,400	25,711,600
83	Diskusi Aktual Pembangunan Daerah	0	0	0	32,375,000	33,450,000	0	0	0	29,056,450	26,958,880				89.75 %	80.59 %	13,165,000	11,203,066
84	Forum Koordinasi Kelitbangan	0	0	0	0	128,940,000	0	0	0	0	107,636,080					83.48 %	25,788,000	21,527,216
85	Penguatan Kelembagaan DRD	0	0	0	0	70,855,000	0	0	0	0	69,058,993					97.47 %	14,171,000	13,811,799
86	Lomba Karya Ilmiah IPTEK	0	0	0	0	41,250,000	0	0	0	0	36,724,400					89.03 %	8,250,000	7,344,880
87	Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan dan Perwako Kelitbangan	0	0	0	0	7,400,000	0	0	0	0	6,632,500					89.63 %	1,480,000	1,326,500
88	SIMPUL PANDANG (Seminar Penelitian Unggula Padang Panjang)	0	0	0	0	30,012,500	0	0	0	0	24,204,200					80.65 %	6,002,500	4,840,840
89	Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah	0	0	0	0	179,352,500	0	0	0	0	162,001,800					90.33 %	35,870,500	32,400,360
	Program Pemanfaatan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan Pemanfaatan Tanah	0	56,935,000	0	0	0	0	56,296,000	0	0	0						0	0
90	Kajian potensi pemanfaatan tanah TNI di Kota Padang Panjang	0	56,935,000	0	0	0	0	56,296,000	0	0	0						11,387,000	11,259,200

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Sebagai organisasi perangkat daerah, eksistensi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan daerah, memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam konteks perencanaan tersebut, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah berperan antara lain :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Mendukung terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar daerah, maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Mendukung tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Mengacu pada peran tersebut, maka tugas Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah mengerucut menjadi 4 peran yang saling terkait yaitu :

1. Pengambil kebijakan/keputusan teknis dibidang perencanaan yaitu penyusunan rencana pembangunan daerah, baik jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), maupun tahunan (RKPD). Dalam hal ini Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah juga bertugas antara lain dibidang penganggaran yaitu penyusunan alokasi pendanaan (indikatif) sebagai bahan penyusunan RAPBD, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
2. *Think tank* atau pengkaji kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan lainnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.
3. Koordinator dengan maksud dalam hal koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, fasilitasi

dan pelaksanaan perencanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dari provinsi dan pusat, koordinasi kegiatan strategi penanganan permasalahan mendesak.

4. Administrator dalam artian sebagai pengelola dokumen perencanaan, penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan serta pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

Bertitik tolak pada uraian di atas, tentunya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang tidak luput dari permasalahan dan hambatan. Namun permasalahan dan hambatan yang muncul tersebut akan menjadi tantangan serta isu strategis yang harus ditindaklanjuti di kemudian hari, terutama dalam perumusan strategi, kebijakan yang dilaksanakan melalui rencana tindak program dan kegiatan yang efektif dan berdayaguna.

Berdasarkan kinerja pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang yang telah dilaksanakan selama periode 2009-2013, melihat situasi yang ada dan perkembangan kondisi kedepannya, maka tantangan yang perlu ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pelayanan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Proses Perencanaan Pembangunan

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang 25 tahun 2004 bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *top down* dan *bottom up*. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini belum terlaksana secara optimal. Hal ini dapat terlihat dari : (1) belum terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, (2) kurangnya keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk masyarakat rentan dan pengarusutamaan gender, (3) belum optimalnya penetapan tolak

ukur dan target kinerja dengan mempertimbangkan SPM pada program/kegiatan pembangunan daerah.

2. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Perencanaan pembangunan daerah dituangkan dalam sebuah dokumen perencanaan, baik dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, perencanaan pembangunan jangka menengah yang dituangkan dalam RPJMD, serta perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam RKPD. Disamping itu dokumen perencanaan daerah tingkat kota tersebut dijabarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) kedalam dokumen perencanaan OPD, yaitu Renstra OPD untuk perencanaan jangka menengah dan Renja OPD untuk perencanaan tahunan. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah ini, masih kurang optimalnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan tingkat kota dengan dokumen perencanaan OPD. Disamping itu, juga terjadi *inconsistency planning* antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan.

3. Koordinasi dan Integrasi perencanaan dan penganggaran

Belum optimalnya integrasi, konsistensi dan keterikatan perencanaan dan penganggaran terhadap perumusan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan, sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah. Disamping itu pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah juga belum terlaksana dengan optimal. Selain itu juga masalah yang juga muncul adalah berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah. Kemudian termasuk juga terdapatnya pertentangan/ketidaksesuaian antara peraturan perundangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan

sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

4. Pemanfaatan Kajian/Hasil Penelitian dalam perencanaan pembangunan

Secara umum, perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas merupakan perencanaan yang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap permasalahan, potensi serta sumberdaya yang ada di daerah. Perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan sektoral, yang masing-masing sektornya saling mendukung dan saling terintegrasi dan bersinergi satu dengan yang lainnya. Dalam penyusunan perencanaan sektoral ini, diperlukan kajian/penelitian serta perencanaan induk yang akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan tahunan, sehingga rencana pembangunan sektoral ini akan lebih jelas dan terarah.

5. Meningkatnya kebutuhan data dalam penyusunan perencanaan

Rencana pembangunan yang berkualitas merupakan rencana pembangunan yang disusun dengan proses perencanaan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan segala potensi dan sumberdaya, serta analisis permasalahan yang muncul ditengah-tengah masyarakat. Analisis perencanaan dilakukan berdasarkan data yang akurat dan up to date serta realita yang terjadi di daerah, sehingga perencanaan dan kebijakan yang diambil betul-betul dapat menjawab dan memenuhi permasalahan masyarakat dan pembangunan yang dilaksanakan merupakan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Adapun peluang kedepan yang dapat dimanfaatkan dalam menghadapi tantangan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya aturan perundang-undangan yang mengatur secara tahapan, tata cara teknis penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
- b. Komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pembangunan.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

### **PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Sesuai ketentuan yang berlaku, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan. Adapun yang menjadi fungsi utama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu Perumusan kebijakan teknis urusan penunjang bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan, pengkoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah, Pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan, Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), hal ini telah merubah pola perencanaan, yang mana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga diwajibkan menyusun perencanaan berupa Rencana Strategis (Renstra). Keterpaduan proses perencanaan antara tingkat OPD dengan Perencanaan Tingkat Daerah, diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat, guna mewujudkan sasaran pembangunan selama 5 tahun. Dengan demikian, usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan dapat tertampung oleh OPD teknis, sehingga dapat dianggarkan dalam APBD.

Sejalan dengan itu, keberadaan institusi perencanaan dalam hal ini Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah yang



membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, memegang peran penting sehingga segala bentuk perencanaan baik tingkat OPD maupun tingkat daerah dapat disinkronkan. Untuk itu kualitas, sikap dan perilaku aparat perencana, sangat menentukan dalam mewujudkan perencanaan yang berkualitas. Pada kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan itu sendiri. Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan yang perlu untuk ditindaklanjuti urusan Perencanaan antara lain, belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti :

1. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah
2. Belum optimalnya konsistensi perencanaan pembangunan daerah
3. Belum optimalnya integrasi perencanaan dan penganggaran
4. Belum optimalnya ketersediaan data dalam penyusunan perencanaan

Sedangkan permasalahan pokok yang perlu ditindak lanjuti untuk urusan penelitian dan pengembangan antara lain :

1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil riset/ penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah belum berjalan baik;
2. Belum optimalnya penerapan Sistem Inovasi Daerah (SiDA) dalam perumusan kebijakan perencanaan daerah.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

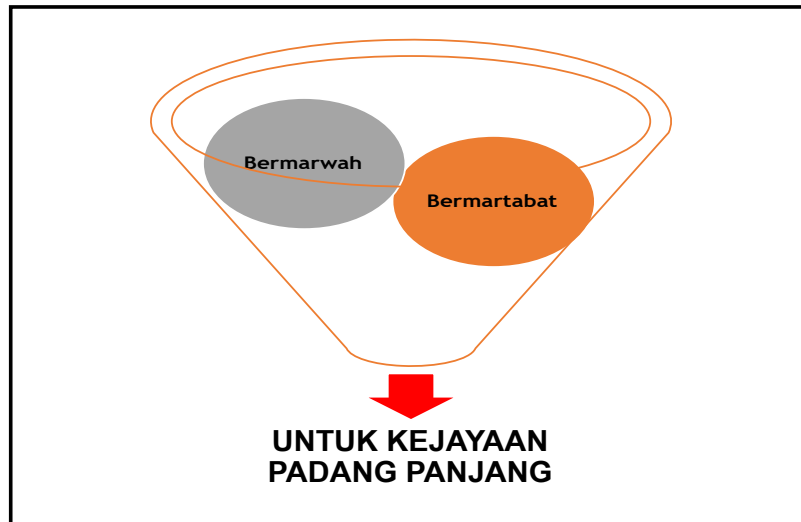
Berdasarkan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, telah ditetapkan Visi dan Misi Kota Padang Panjang yang akan dicapai untuk 5 tahun ke depan. Adapun visi Kota Padang Panjang adalah “**Untuk Kejayaan Padang Panjang Bermarwah dan Bermartabat**”. Berikut adalah penjabaran dari visi Kota Padang Panjang tersebut yaitu :

- ✓ Untuk Kejayaan Padang Panjang, artinya menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih

berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna bagi seluruh warga Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang berfalsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

- ✓ Bermarwah, istilah Marwah adalah istilah yang menunjuk pada kehormatan diri, yang memiliki arti kemuliaan dan kewibawaan. Sehingga, dengan visi 'Menjadikan Kota Padang Panjang sebagai Kota Bermarwah' diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Padang Panjang dan seluruh masyarakatnya. Pimpinan dan rakyat Kota Padang Panjang terus BERGERAK BERSAMA, pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi membela negeri lewat berbagai karya nyata, Bersama-sama dalam semangat penuh cinta dan saling jaga menjaga kebanggaan yang positif pada kotanya Padang Panjang Kota Serambi Mekkah.
- ✓ Bermartabat, diartikan sebagai harkat atau harga diri, kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota dengan karakteristik dan budaya masyarakat yang dapat dijadikan teladan karena ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinannya, berangkat dari akar budaya minang "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah" dalam arti seluas-luasnya tanpa mengabaikan pluraritas budaya yang ada disekitar kita. Kota yang bermartabat dapat diwujudkan melalui Kota yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Padang Panjang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Padang Panjang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kota Padang Panjang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang.

**Gambar 3.1**  
**Hubungan Antar Pokok Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**



Sumber : Rancangan Awal RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

Dengan melihat hubungan antar elemen visi Kota Padang Panjang, maka pembangunan Kota Padang Panjang dilakukan untuk menciptakan kondisi dan keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna bagi seluruh warga Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang berfalsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, dalam pencapaian tersebut pimpinan dan rakyat Kota Padang Panjang harus terus bergerak bersama pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi membela negeri lewat berbagai karya nyata. Selain itu perlunya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berkeadilan sosial untuk sebesar-besarnya “Untuk Kejayaan Padang Panjang Bermarwah dan Bermartabat”

Berdasarkan pengertian visi yang di kemukakan di atas, serta untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, ditetapkanlah 3 misi yang akan dilaksanakan dalam periode 5 tahun mendatang. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan;

- b. Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas daya Saing SDM masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya; dan
- c. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang responsif, Inovatif dan Partisipatif.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang dengan Dokumen RPJMD tahun 2018-2023, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan. Artinya indikator kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Padang Panjang, Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah berkontribusi untuk mewujudkan misi yang ada dalam RPJMD yaitu misi 3 (tiga). Rincian kontribusi Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang terhadap pencapaian misi 3 (tiga) “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang responsive, Inovatif dan Partisipatif”, dengan sasaran yaitu :

- 1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan indikator yang akan dicapai:
  - a. Presentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai lembaga teknis perencanaan, Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagai termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Dengan adanya kontribusi tersebut, diharapkan dari aspek perencanaan dan aspek penelitian dan pengembangan, visi dan misi tersebut dapat diwujudkan bersama seluruh *stakeholder*.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga**

Sebagaimana diketahui, Institusi perencana baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menghasilkan rencana pembangunan berdasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dimaksud dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, yang melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam rangka mengintegrasikan, memadukan, dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, tentu saja penetapan visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran institusi perencana pembangunan harus selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang, sebagai institusi perencana di daerah, menyusun program dan kegiatan sebagai penjabaran dari visi dan misi yang selaras dengan program dan kegiatan institusi perencana tingkat pusat yang mana dalam konteks ini lembaganya adalah Bappenas. Adapun sasaran yang ditetapkan Bappenas adalah :

1. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan.

Dalam kaitan itu, pelaksanaan sinergitas program dan kegiatan Pemerintah Pusat sebagaimana disusun oleh Bappenas dengan program dan kegiatan Pemerintah Kota Padang Panjang yang disusun oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah masih terdapat

kendala terkait dinamika perubahan lingkungan strategi. Kendala tersebut antara lain :

- a. Masih adanya Peraturan Perundangan-undangan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.
- b. Masih terbatasnya kualitas sumberdaya manusia perencana pembangunan di daerah.
- c. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah masih menimbulkan penafsiran yang beragam. Hal ini menimbulkan dampak yang menghambat upaya mensinergikan program-program pembangunan antar daerah serta antara pusat dan daerah.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pada hakikatnya tujuan dari penataan ruang kota yaitu adalah untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif. Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) berfungsi antara lain sebagai:

1. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota.
2. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penataan ruang wilayah Kota Padang Panjang bertujuan untuk mengembangkan struktur dan pola ruang Kota Padang Panjang agar mampu mendukung perkembangan pariwisata, pendidikan, pertanian, industri kecil dan menengah, serta sebagai tempat hunian yang nyaman dalam rangka Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermartabat dan Bermartabat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan. Sejalan dengan itu, tentunya RTRW Kota Padang Panjang dalam setiap proses pembangunan daerah memiliki kedudukan dan pedoman bagi :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
2. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
3. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
4. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
5. Penataan ruang kawasan strategis kota.

Secara umum permasalahan di bidang penataan ruang yang dihadapi oleh Kota Padang Panjang antara lain yaitu belum lengkapnya peraturan teknis sebagai turunan dari Perda RTRW dalam rangka pelaksanaan penataan ruang di daerah, tata ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan berbagai sektor, masih lemahnya atau belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang serta masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berkewajiban mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup. Melalui program dan kegiatan yang ada bersama dengan OPD terkait dilakukan penyusunan dokumen teknis tata ruang dan dokumen perencanaan yang terkait dengan lingkungan hidup yang akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan penataan ruang tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Kebijakan Umum Penataan Ruang, Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan penetapan Kawasan Strategis.

Kebijakan pengembangan struktur ruang, meliputi antara lain kebijakan pengembangan sistem perkotaan yaitu berupa pengintegrasian kawasan perkotaan sebagai Kota yang mandiri dan pusat kegiatan. Termasuk juga dalam hal ini berupa pengembangan kawasan-kawasan baru yang tidak keluar dari struktur ruang yang ada. Untuk Kebijakan pengembangan pola ruang meliputi antara lain kebijakan pengembangan kawasan lindung yang mana sebagian wilayah Padang Panjang termasuk dalam area hutan lindung ataupun penyangga.

Dalam hal kebijakan pengembangan pola ruang, hal ini ditujukan untuk pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta pembatasan kegiatan budidaya di kawasan lindung, yang berpotensi merusak kawasan lindung itu sendiri atau kawasan penyangga. Sedangkan kebijakan pola ruang yang lainnya adalah kebijakan pengembangan kawasan budidaya dengan tujuan antara lain perwujudan kawasan budidaya yang mampu memberikan tempat bermukim dan lingkungan yang layak bagi warga Kota Padang Panjang dan peningkatan keterpaduan antar kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Untuk kebijakan pengembangan kawasan strategis sesuai dengan RTRW Kota Padang Panjang yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013, meliputi antara lain adalah pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis untuk mendukung perekonomian daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing serta pembatasan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan strategis itu sendiri. Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan pengembangan kawasan strategis Kota Padang Panjang tidak akan menyimpang dari RTRW, dengan catatan tetap dilakukan pengawasan dan pengendalian pada kawasan strategis tersebut

Dalam hal Rencana struktur ruang wilayah Kota Padang Panjang, hal ini berkaitan dengan bagaimana merancang sistem pusat pelayanan, sistem jaringan prasarana dan sistem pengolahan prasarana. Sistem pusat pelayanan mengandung makna bagaimana menciptakan dan mendukung Padang Panjang sebagai bagian dari daerah yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi dan kebijakan lain yang mungkin saja melibatkan atau berdampak pada Padang Panjang sebagai kota yang strategis. Untuk sistem jaringan prasarana tentu saja berkaitan dengan sistem jaringan transportasi darat berupa jaringan jalan yang mengemban fungsi jalan arteri, kolektor, jalan lokal, ataupun rencana pembangunan jalan bebas hambatan dan pengaktifan kembali transportasi kereta api.

Sedangkan untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan, sangat berkaitan dengan penyediaan sarana air minum atau air bersih bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Dalam sistem ini termasuk bagaimana



sistem pengelolaan prasarana drainase secara terpadu di Kota Padang Panjang, pengembangan sistem pengelolaan prasarana drainase yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya untuk sistem pengelolaan prasarana pengolah limbah, pengembangan sistem pengelolaan prasarana pengolah limbah sekaligus juga pengembangan instalasi pengolah limbah domestik dengan sistem komunal pada kawasan bantaran sungai, permukiman dan perumahan padat penduduk. Dalam hal sistem pengelolaan prasarana pengolah sampah di arahkan pada pengembangan tempat penampungan sementara dan pengembangan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Sungai Andok.

Dari uraian-uraian tersebut, secara nyata Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sangat berkaitan dengan bagaimana nantinya pemanfaatan RTRW untuk pengembangan dan pembangunan kota, termasuk dalam hal pengawasan dan pengendalian, sehingga pengembangan dan pembangunan kota tidak melenceng dari RTRW yang ada. Sedangkan dalam hal KLHS, tentu saja Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan OPD terkait memastikan bahwa pengembangan dan pembangunan Kota Padang Panjang tetap ramah lingkungan dan tidak merusak kondisi lingkungan, termasuk juga pengendalian penyediaan ruang terbuka hijau untuk mendukung fungsi sosial kota.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Analisis tentang isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dapat dipertanggungjawabkan dan mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan

lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Selanjutnya untuk memastikan suatu perencanaan pembangunan yang terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis pada lingkup Internasional, Nasional, Regional termasuk Isu daerah. Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis tersebut merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Di sinilah inti sebenarnya bagaimana rencana strategis Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah disusun dan ditetapkan.

Dalam tugas dan fungsi OPD, Isu-isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah , beberapa isu strategis yang perlu menjadi pertimbangan di dalam menyusun Renstra Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang yaitu sebagai berikut :

1. Mekanisme perencanaan belum berjalan lancar dan optimal;
2. Kebijakan pusat yang sering berubah-ubah dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga berpengaruh terhadap proses perencanaan di daerah;
3. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai kepentingan dan tingkatan belum optimal;
4. Pengaruh dan dampak globalisasi yang sering sulit diprediksi;

Berbagai isu strategis yang dikemukakan di atas, sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan di daerah, terutama didalam merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang diinginkan lima tahun kedepan. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan mewujudkan perencanaan untuk kejayaan Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan, serta koordinasi dan komunikasi antar stakeholder. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut :

- a. Perlu adanya sikap yang arif dan cerdas agar pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai dengan dinamika peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan harus berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- c. Perlu adanya panduan terhadap sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
- d. Perlu adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- e. Diperlukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga dan mesatikan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
- f. Meningkatkan kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (*skill*) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- g. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang sistematis dan akurat, penguasaan teknologi informasi dan

komunikasi,serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan serta penelitian dan pengembangan daerah di Kota Padang Panjang dapat diidentifikasi beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan isu strategis antara lain :
  - a. Pemantapan peran Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah selaku pengambilan keputusan, koordinator, serta *think tank* perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
  - b. Penguatan kerja sama antar lembaga, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal
  - c. Optimalisasi pengendalian dan evaluasi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan Pembangunan
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal dengan isu strategis antara lain :
  - a. Belum optimalnya penggunaan aplikasi dokumen perencanaan pembangunan dan penanaman modal
  - b. Belum adanya pejabat fungsional perencana pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah yang secara teknis dan fungsi bisa membantu menyusun perencanaan.
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dengan isu strategis antara lain :
  - a. Ketersediaan data yang valid serta informasi pendukung penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan penanaman modal
4. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal yang meliputi perencanaan tata ruang dan fisik, perencanaan ekonomi dan pembiayaan, perencanaan sosial budaya dan kesejahteraan rakyat, pemerintahan, penelitian pengembangan dan statistik dengan isu strategis antara lain :

- a. Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan.
  - b. Ketersediaan data statistik untuk pendukung perencanaan pembangunan.
5. Pelayanan teknis administratif yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan isu strategis antara lain :
- a. Masih kurangnya SDM Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  - b. Masih belum dimanfaatkannya sistem teknologi informasi secara optimal, dalam pemberian pelayanan dibidang perencanaan kepada stakeholder.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DAERAH**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih, maka dirumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis, yang menunjukkan hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah terpilih selama kurun waktu lima tahun ke depan.

Tujuan pembangunan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang periode 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran serta indikator masing-masing sasaran dan target kinerja tahunan dapat dijelaskan melalui Tabel berikut.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD**  
**Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah**  
**Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah		Predikat sistem akuntabilitas kinerja pemerintah	B (60,1)	BB (65)	BB (70)	BB (75)	A (80,02)
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Presentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah	70 %	74 %	78 %	82 %	85 %

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Arah Kebijakan**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dijelaskan sebelumnya, diperlukan rumusan strategi dan kebijakan yang konkrit, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
2. Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang ekonomi sumber daya alam dan infrastruktur
3. Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang Pembangunan manusia, sosial budaya pemerintahan
4. Melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan di segala bidang, dan Melaksanakan koordinasi pengembangan Inovasi Daerah berbasis IPTEK

Untuk lebih jelasnya keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun 2018-2023 dapat digambarkan pada Tabel berikut :



**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>VISI : Untuk Kejayaan Padang Panjang Bermarwah dan Bermartabat</b>			
<b>MISI : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang responsif, Inovatif dan Partisipatif</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang ekonomi sumber daya alam dan infrastruktur	Meningkatkan kualitas perencanaan bidang ekonomi sumber daya alam dan infrastruktur
			Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang ekonomi sumber daya alam dan infrastruktur
		Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang Pembangunan manusia, sosial budaya pemerintahan	Meningkatkan kualitas perencanaan bidang Pembangunan manusia, sosial budaya pemerintahan
			Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang Pembangunan manusia, sosial budaya pemerintahan
		Peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
			Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah
			Meningkatkan kualitas data pembangunan daerah

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
		Peningkatan hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif dalam kebijakan daerah	<p>Peningkatan pelaksanaan, Program yang berkaitan dengan isu-isu aktual program strategis Pemerintah Daerah</p> <p>Membangun jejaring kerjasama kelembagaan dengan stakeholders terkait</p>

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk periode 2018-2023, meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program dan kegiatan ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan tetap mengacu pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018. Keterkaitan sasaran, program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah dapat dijelaskan pada Tabel 6.1 berikut.

**Tabel 6.1.**  
**Keterkaitan Antara Kelompok Sasaran, Program dan Kegiatan**  
**Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah**  
**Kota Padang Panjang 2018-2023**

No	Sasaran	Program	Kegiatan
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Program Pengembangan data/ informasi	1. Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2. Sistem Informasi Manajemen Perencanaan
		2. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	1. Fasilitasi Pelaksanaan SATIMISAKE 2. Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Sanitasi 3. Review RPI2JM 4. Pengembangan dan updating GIS 5. Koordinasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (TKPP)
		3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah 2. Penyusunan RKPD 3. Musrenbang RPJMD

No	Sasaran	Program	Kegiatan
			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD</li> <li>5. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah</li> <li>6. Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan RKPD</li> <li>7. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan</li> <li>8. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan</li> <li>9. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang didanai APBN</li> <li>10. Fasilitasi penyusunan Renja dan Renstra Perangkat Daerah</li> <li>11. Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD</li> <li>12. Revisi RPJMD</li> <li>13. Penyusunan Kalender Perencanaan</li> </ol>
		4. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah</li> <li>2. Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan PUG</li> <li>3. Pembinaan Forum Kota Sehat</li> <li>4. Investigasi Usulan Kegiatan Pembangunan</li> <li>5. Optimalisasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</li> </ol>

No	Sasaran	Program	Kegiatan
		5. Program Penelitian dan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian dan kajian masalah Sosial</li> <li>2. Penelitian dan kajian ekonomi dan Infrastruktur</li> <li>3. Diskusi Aktual Pembangunan Daerah</li> <li>4. Penguatan peran pelaku kelitbangan Daerah</li> <li>5. Survey, Pemetaan dan Perumusan Kebijakan Strategis</li> <li>6. Kajian Kota Ramah Disabilitas</li> <li>7. Kajian Pembangunan Sport Centre</li> <li>8. Kajian Peluang dan Potensi industri kapur</li> <li>9. Kajian Pengelolaan Sampah</li> <li>10. Kajian Transportasi Darat</li> </ol>
		6. Penguatan Inovasi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Sistem dan Jejaring Inovasi Daerah</li> <li>2. Penjaringan Ide dan Pengembangan Inovasi Masyarakat</li> <li>3. Penguatan Inovasi Pemda dan Inovasi Masyarakat</li> <li>4. Lomba Inovasi Daerah Kota Padang Panjang</li> </ol>

Berdasarkan Program tersebut diatas, maka kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Data/ Informasi

a. Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Kegiatan ini merupakan implementasi dari Permendagri No.8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah,

dimana bertujuan untuk menginventarisir data-data tentang Data Umum Daerah, Sosial Budaya, Sumber Daya Alam, Insfrastruktur, Ekonomi, Keuangan Daerah, Politik Hukum dan Keamanan serta Insidensial yang kemudian di entrikan secara Online guna mengisi format yang telah ditetapkan dari Pemerintah Pusat dengan menyediakan software SIPD berbasis Web yang lebih fungsional dan aksesibel, serta penggandaan beberapa buku tentang data Daerah seperti PPDA dan PDRB.

b. Sistem Informasi Manajemen Perencanaan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif dan transparan yaitu *e-Planning*. Tujuan kegiatan ini yakni tersedianya aplikasi *e-Planning* yang digunakan dalam proses Musrenbang, serta dapat meningkatnya SDM aparat perencana menggunakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

a. Fasilitasi Pelaksanaan SATIMISAKE

Kegiatan ini merupakan wadah fasilitasi pelaksanaan penganggaran satu sampai tiga milyar per kelurahan untuk pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Wujud dari kegiatan ini adalah berupa pendampingan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program SATIMISAKE.

b. Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Sanitasi

Kegiatan ini merupakan wadah fasilitasi perencanaan pembangunan sektor perumahan dan sanitasi yang dilakukan melalui pembentukan pokja dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait.

c. Review Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM)

Kegiatan ini merupakan review terhadap rencana pembangunan infrastruktur jangka menengah bidang Keciaptakaryaan, yang pada setiap tahunnya perlu sinkronisasi dengan kegiatan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta potensi sumber pendanaan lainnya.

d. Pengembangan dan updating GIS.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan updating data geografis Kota Padang Panjang yang berbasis web. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pengumpulan data oleh Tim Pengumpul data serta pengentrian dan pengolahan data oleh tim pengelola GIS.

e. Koordinasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (TKPP).

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kotaku, terutama untuk dalam hal pemberdayaan ekonomi lokal.

3. Program Perencanaan Pembangunan daerah, dengan kegiatan:

a. Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan wahana antar pihak-pihak yang mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan OPD sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyelaraskan menyelaraskan program dan kegiatan OPD dengan usulan hasil musrenbang kecamatan, mempertajam indikator serta target dan program, menyelaraskan program dan kegiatan antar OPD dan menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatof masing-masing OPD.

b. Penyusunan RKPD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun rencana kerja tahunan (RKPD) Kota Padang Panjang. Kegiatan ini meliputi pengumpulan data dan informasi, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir dan penetapan RKPD dengan Peraturan Walikota.

c. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan dalam rangka membahas rancangan

RKPD. Berdasarkan hasil musrenbang RKPD ini disempurnakan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir OPD.

d. Musrenbang RPJMD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023 dalam rangka membahas dan menyepakati rancangan RPJMD, dengan tujuan untuk mendapat masukan dan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023.

e. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Jangka Menengah Daerah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk penyusunan buku evaluasi pelaksanaan tahun kelima (terakhir) RPJMD Kota Padang Panjang 2013-2018.

f. Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan RKPD.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 dan 2023 untuk melihat sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

g. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pembekalan kepada seluruh Ketua RT, Fasilitator Kelurahan, Fasilitator Kecamatan, Operator *e-Musrenbang* Kelurahan Kecamatan di Kota Padang Panjang dalam rangka pelaksanaan Musrenbang di tingkat RT, Kelurahan dan Kecamatan, sehingga dapat terwujud perencanaan bottom up dan partisipatif.

h. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun RKPD Perubahan sebagai pedoman dalam penyusunan KUA PPA Perubahan dan RAPBD Perubahan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 286 Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP 8 Tahun 2008



tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

i. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang didanai APBN

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memonitoring dan melaporkan pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh APBN berupa dana DAK dan TAP-UB yang diterima oleh Pemerintah Kota Padang Panjang.

j. Fasilitasi penyusunan Renja dan Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendampingi dan mengoordinasikan OPD dalam penyusunan Renja dan Renstra OPD dengan berpedoman pada RPJMD Kota Padang Panjang 2013-2018.

k. Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membuat rancangan akhir RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023, berdasarkan visi misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, berdasarkan hasil konsultasi publik dan Musrenbang RPJMD. Draft RPJMD ditetapkan menjadi RPJMD dengan Peraturan Daerah.

l. Revisi RPJMD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk merevisi RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 dimana setelah 2 atau 3 tahun RPJMD dilaksanakan jika dirasa perlu akan melakukan perubahan sesuai dengan aturan yang berlaku dan harus melalui perubahan Raperda RPJMD.

m. Penyusunan Kalender Perencanaan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membuat kalender perencanaan tahunan untuk dipedomani oleh seluruh OPD dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

4. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan

a. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin, mengembangkan potensi dan memperkuat

kapasitas kelompok masyarakat miskin serta memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

b. Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan PUG

kegiatan ini bertujuan untuk terwujudnya pembangunan responsif gender di Kota Padang Panjang.

c. Pembinaan Forum Kota Sehat

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan forum kota sehat dengan mengadakan rapat koordinasi dengan beberapa OPD yang terkait dengan tatanan kota sehat.

d. Investigasi Usulan Kegiatan Pembangunan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meninjau dan menilai kelayakan usulan pembangunan hasil musrenbang di kecamatan. Kegiatan ini dilakukan dengan menurunkan tim yang melibatkan anggota dari beberapa OPD terkait.

e. Optimalisasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan rencana aksi pemberantasan korupsi di Kota Padang Panjang. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengadakan rapat koordinasi dengan beberapa OPD terkait, serta penyusunan dan penyampaian laporan setiap triwulannya ke Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Propinsi Sumbar.

5. Program Penelitian dan Pengembangan

a. Penelitian dan kajian masalah Sosial

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan Sosial sebagai alternative pemecahan masalah bagi pemerintah daerah serta mengkaji potensi dan sumberdaya Sosial guna perwujudan kesejahteraan masyarakat Kota Padang Panjang.

b. Penelitian dan kajian ekonomi dan Infrastruktur

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan Ekonomi Infrastruktur sebagai alternative pemecahan masalah bagi pemerintah daerah serta mengkaji potensi dan sumberdaya Ekonomi Infrastruktur guna perwujudan kesejahteraan masyarakat Kota Padang Panjang.

c. Diskusi Aktual Pembangunan Daerah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memecahkan suatu masalah strategis yang terjadi di tingkat Kota, provinsi maupun Nasional. Dalam diskusi actual ini akan membahas suatu permasalahan tertentu yang diperlukan penyelesaiannya. Hasil pelaksanaan diskusi actual berupa rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan.

d. Penguatan peran pelaku kelitbangan Daerah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) dan Tenaga Ahli (akademisi) dalam memberikan masukan atas permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah. Kegiatan ini juga memfasilitasi tenaga ahli dalam melakukan rapat kerja dengan Pemerintah Daerah. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah rekomendasi tenaga ahli terhadap kasus/masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah.

e. Survey, Pemetaan dan Perumusan Kebijakan Strategis

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melihat atau memetakan kebutuhan masyarakat Kota Padang Panjang terhadap kebijakan yang akan dibuat oleh Pemerintah Daerah. Kajian ini adalah cara lain bagi Pemerintah Daerah untuk melihat hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah sehingga Kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Daerah tepat sasaran sesuai kebutuhan riil masyarakat Kota Padang Panjang.

f. Kajian Kota Ramah Disabilitas

Kegiatan ini merupakan niat dari Pemerintah Kota Padang Panjang untuk menjadikan Kota Padang Panjang ramah disabilitas. Dalam

kajian ini diharapkan tertuang potensi yang telah dimiliki Kota Padang Panjang serta Standar kebutuhan sarana maupun prasarana sebuah Kota untuk dijadikan Kota Ramah Disabilitas.

g. Kajian Pembangunan Sport Centre

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi terkait apakah perlu dibangun sebuah pusat untuk kegiatan olahraga di kota Padang Panjang. Atau cukup dengan revitalisasi GOR Bancah Laweh untuk menampung kebutuhan akan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat kota Padang Panjang.

h. Kajian Peluang dan Potensi industri kapur

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi/masukan terkait kelayakan pengembangan potensi industri kapur. Dari hasil kajian diharapkan dapat tergambar kelayakan dari aspek ekonomi, alam, aturan dan kewenangan.

i. Kajian Pengelolaan Sampah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan terkait pengelolaan sampah yang ada di Kota Padang Panjang. Dari hasil kajian ini diharapkan dapat mencari solusi penanganan sampah baik itu program 3 R (reduce, reuse dan recycle). Selain itu dari kajian ini diharapkan penanganan sampah yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi kepada masyarakat.

j. Kajian Transportasi Darat

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah lalu lintas yang ada di Kota Padang Panjang. Bagaimanakah rekayasa lalu lintas agar terwujud lalu lintas yang aman, tertib dan lancar serta bebas dari kemacetan.

k. Penguatan Sistem dan jejaring Inovasi Daerah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan pengembangan inovasi daerah dengan mendayagunakan segenap potensi pembangunannya secara efisien guna menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas secara

berkelanjutan sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- l. Penjaringan Ide dan Pengembangan Inovasi Masyarakat
- m. Penguatan Inovasi Pemda dan Inovasi Masyarakat
- n. Lomba Inovasi Daerah Kota Padang Panjang

Untuk lebih jelasnya program, kegiatan, indikator kinerja, sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 6.2 berikut.

**Tabel 6.2**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan**  
**Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2018-2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja padaakhir periode Renstra PD	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							4,390,885,500		4,125,686,020		4,525,511,894		4,198,203,050		4,338,169,813		21,578,456,277
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah		3 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		90%	1,030,547,800	90%	950,568,020	90%	1,036,097,894	90%	1,030,547,800	90%	1,030,547,800	90%	5,078,309,314
		3 02 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pembelian meterai, jumlah paket yang dikirimkan		425 lembar meterai 6000, 350 lembar meterai 3000 dan benda pos lainnya	4,650,000	425 lembar meterai 6000, 350 lembar meterai 3000 dan benda pos lainnya	4,185,000	425 lembar meterai 6000, 350 lembar meterai 3000 dan benda pos lainnya	4,650,000	425 lembar meterai 6000, 350 lembar meterai 3000 dan benda pos lainnya	4,650,000	425 lembar meterai 6000, 350 lembar meterai 3000 dan benda pos lainnya	4,650,000		22,785,000
		3 02 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan		12 bulan	54,300,000	12 bulan	54,300,000	12 bulan	54,300,000	12 bulan	54,300,000	12 bulan	54,300,000		271,500,000
		3 02 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara; dan THL sopir yang tersedia		3 unit R4, 23 unit R2; 2 orang sopir	195,200,000	3 unit R4, 23 unit R2; 2 orang sopir	175,680,000	3 unit R4, 23 unit R2; 2 orang sopir	195,200,000	3 unit R4, 23 unit R2; 2 orang sopir	195,200,000	3 unit R4, 23 unit R2; 2 orang sopir	195,200,000		956,480,000
		3 02 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan; Jumlah tenaga kebersihan dan penjaga malam		1 tahun; 5 orang	176,450,000	1 tahun; 5 orang	176,450,000	1 tahun; 5 orang	176,450,000	1 tahun; 5 orang	176,450,000	1 tahun; 5 orang	176,450,000		882,250,000
		3 02 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan		25 jenis	72,508,000	25 jenis	65,257,200	25 jenis	72,508,000	25 jenis	72,508,000	25 jenis	72,508,000		355,289,200
		3 02 01 11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan jumlah fotocopi yang disediakan		2 jenis	69,999,800	2 jenis	62,999,820	2 jenis	69,999,800	2 jenis	69,999,800	2 jenis	69,999,800		342,999,020
		3 02 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia		10 jenis	5,000,000	10 jenis	4,500,000	10 jenis	5,000,000	10 jenis	5,000,000	10 jenis	5,000,000		24,500,000
		3 02 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan		20 kali	17,440,000	20 kali	15,696,000	20 kali	22,990,094	20 kali	17,440,000	20 kali	17,440,000		91,006,094
		3 02 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah keikutsertaan dalam rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah		1 tahun	435,000,000	1 tahun	391,500,000	1 tahun	435,000,000	1 tahun	435,000,000	1 tahun	435,000,000		2,131,500,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		90%	139,000,000	90%	182,600,000	90%	425,560,000	90%	259,088,000	90%	292,792,000	90%	1,299,040,000
		3 02 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan		-	-	10 jenis	100,000,000	10 jenis	125,000,000	10 jenis	150,000,000	10 jenis	175,000,000		550,000,000
		3 02 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung Kantor yang dipelihara secara berkala		1 unit	75,000,000	1 unit	25,000,000	1 unit	30,000,000	1 unit	35,000,000	1 unit	40,000,000		205,000,000
		3 02 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara secara berkala		15 jenis	64,000,000	15 jenis	57,600,000	15 jenis	70,560,000	15 jenis	74,088,000	15 jenis	77,792,000		344,040,000
		3 02 02 42	Rehab sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehab sedang/ berat gedung kantor		-	-	-	-	1 unit	200,000,000	-	-	-	-		200,000,000
		3 02 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		0%	0	90%	40,000,000	90%	0	90%	55,000,000	90%	0	72%	95,000,000
		3 02 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia		-	-	40 orang	40,000,000	-	-	40 orang	55,000,000	-	-		95,000,000
		3 02 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		90%	114,000,000	90%	140,000,000	90%	207,250,000	90%	220,000,000	90%	230,250,000	90%	911,500,000
		3 02 05 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek dan sosialisasi		8 Orang	100,000,000	8 Orang	90,000,000	8 Orang	120,000,000	8 Orang	130,000,000	8 Orang	140,000,000		580,000,000
		3 2 5 4	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan kemampuan teknis aparat perencana		35 orang	14,000,000	35 orang	50,000,000	35 orang	87,250,000	35 orang	90,000,000	35 orang	90,250,000		331,500,000
		3 02 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100%	3,060,500	100%	2,213,000	100%	3,373,000	100%	3,542,000	100%	3,719,000	100%	15,907,500
		3 02 06 01	Penyusunan perencanaan pelaporan capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang dihasilkan		12 laporan	1,349,000	12 laporan	416,000	12 laporan	1,487,000	12 laporan	1,561,000	12 laporan	1,639,000		6,452,000
		3 02 06 02	Penyusunan pelaporan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan keuangan yang dihasilkan		3 laporan	1,711,500	3 laporan	1,797,000	3 laporan	1,886,000	3 laporan	1,981,000	3 laporan	2,080,000		9,455,500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	3 02 15	Program Pengembangan data/informasi	Tingkat ketersediaan data OPD dalam sistem informasi pembangunan daerah		65%	133,399,800	70%	275,000,000	75%	285,000,000	80%	155,000,000	85%	255,000,000	75%	1,103,399,800
		3 02 15 12	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah data dan perencanaan yang dikelola		41 data urusan	14,750,000	41 data urusan	25,000,000	41 data urusan	65,000,000	41 data urusan	25,000,000	41 data urusan	25,000,000	41 data urusan	154,750,000
		3 02 15 13	Sistem Informasi Manajemen Perencanaan	Jumlah modul aplikasi perencanaan yang dikembangkan		1 modul aplikasi	118,649,800	2 modul aplikasi	250,000,000	3 modul aplikasi	220,000,000	2 modul aplikasi	130,000,000	2 modul aplikasi	230,000,000	10 modul aplikasi	948,649,800
		3 06 16	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam yang Ditindaklanjuti		75%	144,174,500	-	-	-	-	-	-	-	-	75%	144,174,500
		3 06 16 03	Fasilitasi Pelaksanaan SATIMISAKE	Jumlah Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan SATIMISAKE		4 kali	27,324,900	-	-	-	-	-	-	-	-	4 kali	27,324,900
		3 06 16 05	Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Sanitasi	Jumlah Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Sanitasi		4 kali	48,899,900	-	-	-	-	-	-	-	-	4 kali	48,899,900
		3 06 16 27	Review RPI2JM	Jumlah Buku Review RPI2JM yang dibuat		1 dokumen	15,299,800	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	15,299,800
		3 06 16 28	Pengembangan dan updating GIS	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan/update dan Jumlah Peserta Pelatihan GIS		1 aplikasi dan 30 orang	52,649,900	-	-	-	-	-	-	-	-	1 aplikasi dan 30 orang	52,649,900
		3 06 16	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase Rata-rata Capaian Program Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur		-	-	78%	176,205,000	80%	193,826,000	83%	153,210,000	85%	234,525,000	82%	757,766,000
		3 06 16 03	Fasilitasi Pelaksanaan SATIMISAKE	Jumlah Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan SATIMISAKE		-	-	4 kali	30,057,000	4 kali	33,063,000	4 kali	36,369,000	4 kali	40,000,000	16 kali	139,489,000
		3 06 16 05	Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Sanitasi	Jumlah Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Sanitasi		-	-	4 kali	53,789,000	4 kali	59,168,000	4 kali	65,085,000	4 kali	71,594,000	16 kali	249,636,000
		3 06 16 27	Review RPI2JM	Jumlah Buku Review RPI2JM yang dibuat		-	-	1 dokumen	16,829,000	1 dokumen	18,512,000	1 dokumen	20,364,000	1 dokumen	22,400,000	4 dokumen	78,105,000
		3 06 16 28	Pengembangan dan updating GIS	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan/update dan Jumlah Peserta Pelatihan GIS		-	-	1 aplikasi dan 30 orang	57,914,000	1 aplikasi dan 30 orang	63,706,000	1 aplikasi dan 30 orang	10,077,000	1 aplikasi dan 30 orang	77,084,000	1 aplikasi dan 30 orang	208,781,000
		3 01 22 11	Koordinasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (TKPP)	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh		-	-	1 laporan	17,616,000	1 laporan	19,377,000	1 laporan	21,315,000	1 laporan	23,447,000	4 laporan	81,755,000



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3 02 21	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD</b>		80%	973,411,700	83%	897,100,000	85%	1,141,205,000	85%	937,415,250	85%	1,225,736,013	84%	5,174,867,963
		3 02 21 07	Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Forum Lintas Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan		2 kali	55,274,800	1 kali	30,000,000	1 kali	30,000,000	1 kali	30,000,000	1 kali	30,000,000	6 kali	175,274,800
		3 02 21 08	Penyusunan RKPD	Jumlah dokumen RKPD yang disusun tepat waktu		1 dokumen	21,149,900	1 dokumen	23,000,000	1 dokumen	23,000,000	1 dokumen	23,000,000	1 dokumen	24,000,000	5 dokumen	114,149,900
		3 02 21 09	Pelaksanaan Musrenbang RKPD	Jumlah pelaksanaan Musrenbang RKPD		1 kali	86,699,800	1 kali	87,000,000	1 kali	88,000,000	1 kali	89,000,000	1 kali	90,000,000	5 kali	440,699,800
		** ** *	Musrenbang RPJMD	Jumlah musrenbang RPJMD yang dilaksanakan		1 kali	72,650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	72,650,000
		3 02 21 22	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah	Jumlah Laporan Evaluasi pelaksanaan RPJMD		1 dokumen	13,400,000	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000	5 dokumen	113,400,000
		3 02 21 34	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan RKPD	Jumlah Laporan Evaluasi dan Hasil Pengendalian Pelaksanaan RKPD Jumlah rapat kooedinasi percepatan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan		4 dokumen	62,650,000	4 dokumen	577,000,000	4 dokumen	585,000,000	4 dokumen	590,000,000	4 dokumen	630,000,000	20 dokumen 48 kali	2,444,650,000
		3 02 21 40	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	Jumlah Fasilitator Kecamatan dan Kelurahan yang di latih		54 orang	17,499,800	54 orang	18,000,000	54 orang	18,000,000	54 orang	19,000,000	54 orang	20,000,000	54 orang	92,499,800
		3 02 21 42	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahunan (RKPD perubahan)		1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000	5 dokumen	125,000,000
		3 02 21 47	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang didanai APBN	Laporan Pelaksanaan Kegiatan dana APBN dan Koordinasi Perencanaan kegiatan dana APBN		4 laporan	38,887,500	4 laporan	42,100,000	4 laporan	44,205,000	4 laporan	46,415,250	4 laporan	48,736,013	20 dokumen	220,343,763
		3 02 21 49	Fasilitasi penyusunan Renja dan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan Renstra yang disusun		48 dokumen	276,349,900	24 dokumen	55,000,000	48 dokumen	138,000,000	24 dokumen	75,000,000	24 dokumen	118,000,000	48 dokumen	662,349,900
		3 02 21 51	Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD	Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RPJMD		1 dokumen	303,850,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	303,850,000
		3 02 21	Revisi RPJMD	Jumlah dokumen revisi RPJMD		-	-	-	-	1 dokumen	150,000,000	-	-	1 dokumen	200,000,000	2 dokumen	350,000,000
		3 02 21	Penyusunan Kalender Perencanaan	Jumlah kalender yang dicetak		-	-	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	15,000,000	4 dokumen	60,000,000
		3 02 23	<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi</b>	<b>Persentase Rata-rata Capaian Program Bidang Ekonomi</b>		75%	16,014,800	-	-	-	-	-	-	-	-	75%	16,014,800
		3 01 22 11	Koordinasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (TKPP)	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh		1 dokumen	16,014,800	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	16,014,800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3 02 23	<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya yang Ditindaklanjuti</b>		75%	275,046,300	-	-	-	-	-	-	-	-	15%	275,046,300
		3 02 23 08	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah dokumen SPKD 2019-2023 dan Laporan Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD)		2 dokumen	81,650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	81,650,000
		3 02 23 09	Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan PUG	Jumlah OPD yang di pantau/ditelaah		24 OPD	38,104,800	-	-	-	-	-	-	-	-	24 OPD	38,104,800
		3 02 23 11	Pembinaan Forum Kota Sehat	Jumlah rapat koordinasi dan pemantauan; Jumlah peserta sosialisasi		6 kali; 2 kali	19,329,500	-	-	-	-	-	-	-	-	6 kali; 2 kali	19,329,500
		3 02 23 12	Investigasi Usulan Kegiatan Pembangunan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh		60 eksemplar	124,562,000	-	-	-	-	-	-	-	-	60 eksemplar	124,562,000
		3 02 23 13	Optimalisasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan Pelaksanaan Aksi PPK		4 Laporan	11,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Laporan	11,400,000
		3 02 23	<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan</b>	<b>Persentase Rata-rata Capaian Program Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan</b>		-	-	78%	472,000,000	80%	278,200,000	83%	284,400,000	85%	290,600,000	65%	1,325,200,000
		3 02 23 08	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah dokumen SPKD 2019-2023 dan Laporan Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD)		-	-	1 dokumen	350,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	150,000,000	6 dokumen	800,000,000
		3 02 23 09	Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan PUG	Jumlah OPD yang di pantau/ditelaah		-	-	24 OPD	40,000,000	24 OPD	42,000,000	24 OPD	44,000,000	24 OPD	46,000,000	24 OPD	172,000,000
		3 02 23 11	Pembinaan Forum Kota Sehat	Jumlah rapat koordinasi dan pemantauan; Jumlah peserta sosialisasi		-	-	6 kali; 2 kali	20,200,000	6 kali; 2 kali	21,300,000	6 kali; 2 kali	22,300,000	6 kali; 2 kali	23,400,000	6 kali; 2 kali	87,200,000
		3 02 23 12	Investigasi Usulan Kegiatan Pembangunan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh		-	-	60 eksemplar	49,800,000	60 eksemplar	52,400,000	60 eksemplar	55,000,000	60 eksemplar	57,500,000	60 eksemplar	214,700,000
		3 02 23 13	Optimalisasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan Pelaksanaan Aksi PPK		-	-	4 Laporan	12,000,000	4 Laporan	12,500,000	4 Laporan	13,100,000	4 Laporan	13,700,000	4 Laporan	51,300,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3 02 25	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kelibangan dalam perumusan kebijakan daerah		70%	1,515,900,100	75%	765,000,000	8%	755,000,000	85%	900,000,000	90%	575,000,000	66%	4,510,900,100
		3 02 25 04	Penelitian dan kajian masalah Sosial	Jumlah dokumen kajian yang disusun		1 dokumen	155,000,000	2 dokumen	160,000,000	3 dokumen	240,000,000	1 dokumen	80,000,000	1 dokumen	80,000,000	8 dokumen	715,000,000
			Penelitian dan Kajian masalah sosial			1 dokumen	155,000,000	1 dokumen	80,000,000	1 dokumen	80,000,000	1 dokumen	80,000,000	1 dokumen	80,000,000		
			Pengembangan Potensi Kerjasama Daerah yang			-	-	1 dokumen	80,000,000	-	-	-	-	-	-		
			Penelitian Peranan DPRD menjalankan fungsinya dalam Kajian Efektifitas Pembayaran Tunjangan			-	-	-	-	1 dokumen	80,000,000	-	-	-	-		
						-	-	-	-	1 dokumen	80,000,000	-	-	-	-		
		3 02 25 05	Penelitian dan kajian ekonomi dan Infrastruktur	Jumlah dokumen kajianyng disusun		1 dokumen	200,000,000	3 dokumen	210,000,000	2 dokumen	180,000,000	3 dokumen	380,000,000	1 dokumen	150,000,000	10 dokumen	1,120,000,000
			Penelitian dan Kajian ekonomi insfrastruktur			1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	150,000,000		
			Kajian Potensi Keanekaragaman Pangan Lokal			-	-	1 dokumen	100,000,000	-	-	-	-	-	-		
			Pemetaan dan pengembangan potensi ekonomi kreatif sebagai penggerak industri pariwisata			-	-	-	-	1 dokumen	80,000,000	-	-	-	-		
			Penelitian Peluang Penyediaan Lahan untuk Peternakan Dampak Pemanfaatan Pasar Pusat Padang Panjang terhadap Pendapatan Potensi PAD dari RSUD			-	-	1 dokumen	100,000,000	-	-	-	-	-	-		
		3 02 25 06	Diskusi Aktual Pembangunan Daerah	Jumlah topik diskusi aktual pembangunan daerah yang dilaksanakan		3 topik	55,000,100	3 topik	125,000,000	3 topik	130,000,000	3 topik	130,000,000	3 topik	130,000,000	15 topik	570,000,100
		3 02 25 08	Penguatan peran pelaku kelitbangan Daerah	Jumlah forum kelitbangan yang dilaksanakan dan pelaksanaan kegiatan Dewan Riset Daerah		4 kali forum	299,300,000	4 kali forum	80,000,000	4 kali forum	85,000,000	4 kali forum	90,000,000	4 kali forum	95,000,000	20 kali forum	649,300,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3 02 25 08	Survey, Pemetaan dan Perumusan Kebijakan Strategis	Jumlah dokumen hasil survey yang dihasilkan		1 dokumen	100,000,000	3 dokumen	190,000,000	1 dokumen	120,000,000	1 dokumen	220,000,000	2 dokumen	120,000,000	7 dokumen	750,000,000	
		Survey, Pemetaan dan Perumusan Kebijakan Strategis		1 dokumen	100,000,000	-	-	1 dokumen	120,000,000	1 dokumen	120,000,000	1 dokumen	120,000,000					
			Pemetaan Kawasan Pemukiman rawan		-	-	1 dokumen	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Analisis Efektivitas Kebijakan/Program Penanggulangan Kemiskinan		-	-	1 dokumen	90,000,000	-	-	1 dokumen	100,000,000	-	-	-	-		
		01 06 16 24	Kajian Kota Ramah Disabilitas	Jumlah Dokumen Kajian yang disusun		1 Dokumen	83,050,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	83,050,000
		1 18 21 09	Kajian Pembangunan Sport Centre	Jumlah Dokumen Kajian Pembangunan Sport Centre yang disusun		1 dokumen	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	100,000,000
		2 06 19 11	Kajian Peluang dan Potensi industri kapur	Jumlah dokumen kajian yang disusun		1 dokumen (potensi kapur Bukit Tui)	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	200,000,000
		1 04 15 13	Kajian Pengelolaan Sampah	Jumlah dokumen kajian yang disusun		1 dokumen	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	100,000,000
		02 09 15 08	Kajian transportasi darat	Jumlah dokumen kajian transportasi darat yang disusun		1 Dokumen	223,550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	223,550,000
			Penguatan Inovasi Daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.		20%	46,330,000	30%	225,000,000	45%	200,000,000	60%	200,000,000	75%	200,000,000	75%	871,330,000	
		3 02 26 02	Penguatan Sistem dan jejaring Inovasi Daerah	Terlaksananya pembinaan dan penilaian inovasi daerah		1 dokumen	46,330,000	1 dokumen	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	96,330,000
			Penjaringan ide dan pengembangan inovasi masyarakat	Jumlah Dokumen Inventarisasi inovasi yang disusun		-	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000	4 Dokumen	100,000,000
			Penguatan Inovasi Pemda dan Inovasi Masyarakat	Jumlah Penguatan yang dilaksanakan		-	2 kali	50,000,000	2 kali	50,000,000	2 kali	50,000,000	2 kali	50,000,000	2 kali	50,000,000	8 kali	200,000,000
			Lomba Inovasi Daerah Kota Padang Panjang	Jumlah kategori lomba yang dilaksanakan		-	3 Kategori	100,000,000	3 Kategori	125,000,000	3 Kategori	125,000,000	3 Kategori	125,000,000	3 Kategori	125,000,000	3 Kategori	475,000,000

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, telah ditetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang melalui beberapa program prioritas pembangunannya. Indikator tersebut merupakan indikator yang harus dicapai selama 5 (Lima) tahun kedepan, yaitu tahun 2018 hingga tahun 2023.

Indikator kinerja Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang selama tahun 2018-2023 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 di gambarkan melalui Tabel 7.1 berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan**  
**Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**Kota Padang Panjang Tahun 2017-2018**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Indikator Tujuan</b> Predikat sistem akuntabilitas kinerja pemerintah	Score	CC (54,18)	B (60,1)	BB (65)	BB (70)	BB (75)	A (80,02)	A (80,02)
2.	<b>Indikator Sasaran</b> Presentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah	%	NA	70 %	74 %	78 %	82 %	85 %	85 %

## BAB VIII

### PENUTUP

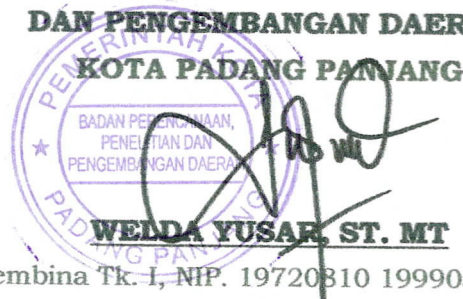
Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA. Rencana Strategis ini memuat tujuan dan sasaran BAPPEDA dalam mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan dibawah kepemimpinan Walikota terpilih periode 2018-2023. Visi dan misi ini dijabarkan serta dicapai melalui strategi, arah kebijakan serta rencana tindak yang dituangkan dalam program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan. Program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan (2018-2023) ini dilengkapi dengan indikator kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan serta melaksanakan kinerja pelayanan BAPPEDA.

Selanjutnya Renstra BAPPEDA ini akan dijabarkan lagi kedalam Rencana Kerja tahunan, dengan harapan perencanaan jangka menengah BAPPEDA periode 2018-2023 dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, serta dapat mendukung upaya pencapaian visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahun ke depan Untuk Kejayaan Padang Panjang Bermarwah dan Bermartabat.

Padang Panjang, 21 Mei 2019

**Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

**KOTA PADANG PANJANG**

  
**WELDA YUSAR, ST. MT**

Pembina Tk. I, NIP. 19720810 199903 2 008